**KOMPETENSI KEWARGANEGARAAN**

**Oleh:**

**Nurul Febrianti, M.Pd.**

1. **Pendahuluan**

Kompetensi kewarganegaraan adalah seperangkat pengetahuan, nilai, dan sikap serta keterampilan yang mendukung menjadi warga negara yang partisipatif dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Margaret Stimman Branson (1999:8) menyatakan bahwa terdapat tiga kompetensi kewarganegaraan utama Pendidikan Kewarganegaraan itu adalah pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge), keterampilan kewarganegaraan (civic skills), dan sikap kewarganegaraan (civic dispotisition).

Civic knowledge berkaitan dengan isi atau apa yang harus warga negara ketahui. Civic skills merupakan keterampilan apa yang seharusnya dimiliki oleh warga negara yang mencakup; keterampilan intelektual dan keterampilan partisipasi. Sedangkan civic disposition berkaitan dengan karakter privat dan publik dari warga negara yang perlu dipelihara dan tingkatan dalam demokrasi konstitusional. Ketiga kompetensi pendidikan kewarganegaraan berkaitan erat dengan sasaran pembentukan pribadi warga negara.

Warga negara yang memiliki pengetahuan dan sikap kewarganegaraan akan menjadi warga negara yang percaya diri (civic confidence), warga negara yang memiliki pengetahuan dan keterampilan kewarganegaraan akan menjadi warga negara yang mampu (civic competence), warga negara yang memiliki sikap dan keterampilan kewarganegaraan akan menjadi warga negara yang komitmen (civic commitment), dan pada akhirnya warga negara yang memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan kewarganegaraan akan menjadi warga negara yang cerdas dan baik (smart and good citizenship). (Winarno, 2014:26-27)

Pendidikan kewarganegaraan (civic education) tidak lepas dari pengaruh global. Pengaruh tersebut secara langsung berdampak pada sikap dan pola pikir peserta didik. Globalisasi menuntut Pendidikan Kewarganegaraan mengembangkan civic competence yang meliputi pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge), keterampilan kewarganegaraan (civic skills), dan watak atau karakter kewarganegaraan (civic disposition) yang multidimensional.

Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia mengemban misi nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia melalui koridor valuebased education dan mengemban misi civic education for democration, sehingga pendidikan kewarganegaraan hendaknya mengkaji konsep besar yang dibawa globalisasi, yakni demokrasi, hak-hak asasi manusia, dan menempatkan hukum di atas segalanya (supremacy of law/rule of law) yang didasarkan pada sepuluh pilar demokrasi (The ten pillars of Indonesian constitutional democracy), meliputi: (1) Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) hak asasi manusia; (3) kedaulatan rakyat; (4) kecerdasan rakyat; (5) pemisahan kekuasaan negara; (6) otonomi daerah; (7) supremasi hukum (rule of law); (8) peradilan yang bebas; (9) kesejahteraan rakyat; dan (10) keadilan sosial. (Sanusi, 1999: 5-6).

Pembelajaran pendidikan kewarganegara-an berorientasi pada konsep “contextualized multiple intelligence” yang membuka pandangan tentang perlunya penanganan pembelajaran yang lebih kreatif, aktif-partisipastif, menggali dan mengembangkan kemampuan peserta didik sesuai dengan potensi atau kecerdasan orisinialnya, bermakna dan menyenangkan. Oleh karena itu, perlu diterapkan contextual teaching and learning dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan.

Di Indonesia, saat ini pembelajaran umumnya masih menekankan pada sistem pembelajaran konvensional dan pola pembelajaran yang menggunakan konsep “contextualized multiple intelligence” belum berkembang secara optimal, sehingga dalam proses pembelajaran, guru sulit menggali kemampuan peserta didik dalam menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Artinya, pembelajaran pendidikan kewarganegaraan tidak mengaitkan materi dengan realita kehidupan peserta didik, tidak kontekstual, lebih banyak memberikan kemampuan untuk menghapal, bukan untuk berpikir kreatif, kritis, dan analitis, bahkan menimbulkan sikap apatis dan menganggap enteng dan kurang menarik. Itulah sebabnya, guru menghadapi kesulitan mengembangkan civic knowledge, civic skills, dan civic dispositions secara komprehensif. Oleh karena itu, perlu dikembangkan pendekatan pembelajaran kontekstual (contextual teaching and learning) sebagai salah satu alternatif.

Pendekatan ini dianggap efektif, karena pendekatan ini memandang bahwa proses belajar benar-benar berlangsung hanya jika peserta didik dapat menemukan hubungan yang bermakna antara pemikiran yang abstrak dengan penerapan praktis dalam konteks dunia nyata. Dalam pengalaman belajar yang demikian, fakta, konsep, prinsip, dan prosedur sebagai materi pelajaran diinternalisasikan melalui proses penemuan, penguatan, keterkaitan, dan keterpaduan (Forgarty, 1991: 1, Mathews & Cleary, 1993:2).

Pembelajaran kontekstual merupakan koordinasi antara materi pelajaran (content) dengan keterampilan intelektual yang harus dimiliki oleh peserta didik dalam suatu kondisi dan situasi yang cocok dengan psikologi kognitif peserta didik, dan kepentingan lingkungan pembelajar (Blanchard, A, 2001: 2). Selanjutnya, Johnson (2002:25) menegaskan bahwa contextual teaching and learning (CTL) membantu peserta didik melihat makna di dalam materi akademik yang mereka pelajari dengan cara menghubungkan subjek-subjek akademik dengan konteks dalam kehidupan keseharian mereka, yaitu dengan konteks keadaan pribadi, sosial, dan budaya mereka. Pendekatan pembelajaran kontesktual ini diasumsikan mampu meningkatkan kompetensi peserta didik.

Komalasari dalam Jurnal Ilmu Pendidikan (2010: 218), menegaskan bahwa “pembelajaran kontekstual merupakan salah satu wujud inovasi pembelajaran yang dapat meningkatkan kompetensi kewarganegaraan peserta didik. Dalam pelaksanaan difusi inovasi, pembelajaran kontekstual ini masih menghadapi berbagai kendala dan resistensi, yang disebabkan berbagai faktor.” Untuk itu, telah dilakukan Pelatihan Terintegrasi Berbasis Kompetensi (PTBK) yang di dalamnya memuat materi tentang pendekatan pembelajaran kontekstual bagi guru-guru SMP Pelatihan ini diselenggarakan oleh Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama Dirjen Pendidikan Menengah dan Dasar Depdiknas RI pada tahun 2004-2005.

Keharusan penerapan pembelajaran kontekstual ini pun diteruskan dalam Kurikulum 2006 yang merupakan pengembangan dari Kurikulum Berbasis Kompetensi. Berdasarkan latar belakang pentingnya pembelajaran kontekstual dalam mengembangkan kompetensi kewarganegaraan, maka secara umum dirumuskan, bagaimana pengaruh pembelajaran kontekstual dalam pendidikan kewarganegaraan terhadap kompetensi kewarganegaraan peserta didik SMP. Secara khusus rumusan masalah tersebut dijabarkan, apakah terdapat pengaruh signifikan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang menerapkan konsep keterkaitan (relating), pengalaman langsung (experiencing), aplikasi (applying), kerjasama (cooperating), pengaturan diri (self-regulating), asesmen autentik (authentic assesment) secara tunggal (zero order), parsial dan bersama-sama terhadap kompetensi kewarganegaraan peserta didik SMP.

1. **Kompetensi Kewarganegaraan**

Kompetensi kewarganegaraan adalah pengetahuan, nilai dan sikap, serta keterampilan peserta didik yang mendukungnya menjadi warga negara yang partisipatif dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Branson (1999:8-9) menegaskan:

Tujuan civic education adalah partisipasi yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik dan masyarakat, baik di tingkat lokal dan nasional. Partisipasi semacam itu memerlukan kompetensi kewarganegaraan sebagai berikut: (1) penguasaan terhadap pengetahuan dan pemahaman tertentu; (2) pengembangan kemampuan intelektual dan partisipatoris; (3) pengembangan karakter atau sikap mental tertentu; dan (4) komitmen yang benar terhadap nilai dan prinsip fundamental demokrasi konstitusional The National Standards for Civics and Government (Center for Civic Education, 1994) merumuskan komponen-komponen utama civic competences yang merupakan tujuan civic education meliputi “pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge), kecakapan kewarganegaraan (civic skills), dan watak-watak kewarganegaraan (civic dispositions).” Pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge) merupakan materi substansi yang harus diketahui warga negara. Pada prinsipnya, pengetahuan yang harus diketahui oleh warga negara berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Pengetahuan ini bersifat mendasar tentang struktur dan sistem politik, pemerintah dan sistem sosial yang ideal sebagaimana terdokumentasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta nilai-nilai universal dalam masyarakat demokratis serta cara-cara kerjasama untuk mewujudkan kemajuan bersama dan hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat global.

Berdasarkan National Standards and Civics Framework for the 1988 National Assessmenst of Educational Progress (NAEP) (Branson, 1999: 9), komponen pengetahuan kewarganegaraan ini diwujudkan dalam bentuk lima pertanyaan penting, yaitu:

(1) Apa kehidupan kewarganegaraan, politik, dan pemerintahan; (2) Apa fondasi-fondasi sistem politik; (3) Bagaimana pemerintahan yang dibentuk oleh konstitusi mengejawantahkan tujuan-tujuan, nilainilai dan prinsip-prinsip demokrasi; (4) hubungan antara suatu negara dengan negara-negara lain dan posisinya dalam masalah-masalah internasional; (5) Apa peran warganegara dalam demokrasi? Pendidikan kewarganegaraan memuat pengetahuan kewarganegaraan yang berbasis pada ilmu politik, hukum, dan kewarganegaraan. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan menyajikan fakta, konsep, generalisasi, dan teori-teori yang dikembangkan dari ilmu politik, hukum, dan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan hendaknya memerhatikan konsep-konsep kunci yang dikembangkan lebih lanjut dalam generalisasi dan teori. Konsep-konsep kunci yang menjadi elemen inti dari pendidikan kewarganegaraan atau “Essensial Elements of Citizenship Education” (Qualifications and Curriculum Authority/QCA, 1998:44) sebagai berikut: (1) democracy and authocracy; (2) cooperation and conflict; (3) equality and diversity; (4) fairness justice, the rule of law, rules, laws and human right; (5) freedom and order; (6) individual and community; (7) power and authority; (8) rights and responsibility. Sementara itu, dalam Kurikulum 2006 konsep-konsep kunci yang harus dikembangkan melalui pendidikan Kewarganegaraan meliputi persatuan dan kesatuan, norma, hukum, dan peraturan, hak asasi manusia, kebutuhan warga negara, konstitusi negara, kekuasan dan politik, demokrasi dan sistem politik, Pancasila, dan globalisasi.

Keterampilan kewarganegaraan (civic skills) merupakan keterampilan yang dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan, agar pengetahuan yang diperoleh menjadi sesuatu yang bermakna, karena dapat dimanfaatkan dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara. Civic skills mencakup intelectual skills (keterampilan intelektual) dan participation skills (keterampilan partisipasi).

Keterampilan intelektual yang terpenting bagi terbentuknya warga negara yang berwawasan luas, efektif, dan bertanggung jawab, antara lain keterampilan berpikir kritis. The National Standards for Civics and Government dan The Civics Framework for 1988 National Assessment of Educational Progress (NAEP) menegaskan bahwa keterampilan berpikir kritis meliputi keterampilan mengidentifikasi, menggambarkan/mendeskripsikan, menjelaskan, menganalisis, mengevaluasi, menentukan, dan memertahankan pendapat yang berkenaan dengan masalah-masalah publik. Sedangkan keterampilan partisipasi meliputi keterampilan berinteraksi, memantau, dan memengaruhi. Dimensi civic skills ini dikembangkan dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berperan serta secara efektif dalam masyarakat, pengalaman berperan serta yang dirancang untuk memperkuat kesadaran berkemampuan dan berprestasi unggul dari peserta didik, dan mengembangkan pengertian tentang pentingnya peran serta aktif warga negara. Untuk dapat berperan aktif tersebut, diperlukan pengetahuan konsep fundamental, sejarah, isu dan peristiwa actual, dan fakta yang berkaitan dengan substansi dan kemampuan untuk menerapkan pengetahuan itu secara kontekstual , dan kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan watak dari warga negara (Quigley, dkk, 1991: 39). Watak-watak kewarganegaraan (civic disposition). Quigley, dkk (1991: 11-14) merumuskan civic disposition dan karakteristiknya sebagai berikut:

Civic disposition adalah sikap dan kebiasaan berpikir warga negara yang menopang berkembangnya fungsi sosial yang sehat dan jaminan kepentingan umum dari sistem demokrasi.” Secara konseptual civic disposition meliputi sejumlah karakteristik kepribadian, yakni civility (respect and civil discourse), individual responsibility, self-discipline, civic-mindedness, open-mindedness (openness, skepticism, recognition of ambiguity), compromise (conflict of principles), compassion, generosity, and loyalty to the nation and its principles”

Artinya, kesopanan yang mencakup penghormatan dan interaksi manusiawi, tanggung jawab individual, disiplin diri, kepedulian terhadap masyarakat, keterbukaan pikiran yang mencakup keterbukaan, skeptisisme, pengenalan terhadap kemenduaan, sikap kompromi yang mencakup prinsip-prinsip konflik dan batas-batas kompromi, toleransi pada keragaman, kesabaran dan keajekan, keharuan, kemurahan hati, dan kesetiaan terhadap bangsa dan segala prinsipnya.

Branson (1999:23) menegaskan lebih lanjut tentang pentingnya civic disposition dan proses pembentukannya, yaitu:

Civic disposition mengisyaratkan pada karakter public maupun privat yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional. Watak-watak kewarganegaraan sebagaimana kecakapan Kewarganegaraan, berkembang secara perlahan sebagai akibat dari apa yang telah dipelajari dan dialami oleh seseorang di rumah, sekolah, komunitas, dan organisasi-organisasi civil society. Karakter privat seperti tanggung jawab moral, disiplin diri dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dari setiap individu adalah wajib. Karakter publik juga tidak kalah penting. Kepedulian sebagai warga negara, kesopanan, mengindahkan aturan main (rule of law), berpikir kritis, dan kemauan untuk mendengar, bernegosiasi dan berkompromi merupakan karakter yang sangat diperlukan agar demokrasi berjalan dengan sukses.

Dengan demikian, civic disposition sangat penting dalam pengembangan demokrasi. Pembentukan civic disposition merupakan suatu proses. Pendidikan merupakan salah satu wahana proses pembentukan civic disposition yang dapat dilakukan pada berbagai lingkungan kehidupan, baik di rumah, sekolah, masyarakat, dan organisasi.

1. **Civic Knowledge**

Civic knowledge atau pengetahuan kewarganegaraan berkaitan dengan kandungan atau isi apa saja yang seharusnya diketahui oleh warga negara. Civic knowledge berkenaan dengan apa -apa yang perlu diketahui dan dipahami secara layak oleh warga negara.

National Center for Learning and Citizenship (NCLC) (dalam Winarno 2012:108) menyatakan, civic knowledge berisikan item pernyataan yang berkaitan dengan sejarah dan pengetahuan kontemporer, seperti pemahaman tentang struktur dan mekanisme pemerintahan konstitusional dan prinsip-prinsip yang melandasinya.

Adapun komponen pengetahuan kewarganegaraan menurut John J. Patrick and Thomas S. Vont sebagai berikut.

Pengetahuan Kewarganegaraan (civic knowledge)

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Mengidentifikasi dan menggambarkan fenomena (kejadian/isu) politik, kewarganegaraan |
| 2 | Menganalisis dan menjelaskan fenomena |
| 3 | Mengevaluasi, mengambil, dan mempertahankan posisi pada acara dan isu public |
| 4 | Berpikir kritis tentang kondisi kehidupan kemasyarakatan |
| 5 | Berpikir secara konstruktif tentang bagaimana memperbaiki kehidupan politik/kemasyarakatan |

(Sumber: ERIC (The Education Resourcess Information Center),2006)

Budimansyah (2007, 2008) dalam Winarno (2012:111) isi dari civic knowledge PKn Indonesia diwujudkan dengan lima pertanyaan sebagai berikut.

1. Apa kehidupan kewarganegaraan, politik, dan pemerintahan?
2. Apa dasar dasar sistem politik Indonesia?
3. Bagaimana pemerintahan yang dibentuk oleh UUD 1945 mengejewantahkan tujuan-tujuan, niai-nilai, dan prinsip-prinsip demokrasi Indonesia?
4. Bagaimana hubungan Indonesia dengan negara lain dan posisinya mengenai masalah-masalah Internasional?
5. Apa peran warga negara dalam demokrasi Indonesia?

Berdasarkan Permendiknas No.22 Tahun 2006, secara tersirat pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge) terjabar ke dalam dan mencakup pengetahuan menenai 8 ruang lingkup kajian, yaitu Persatuan dan Kesatuan Bangsa; norma; hukum; dan peraturan; Hak Asasi Manusia; Kebutuhan Warga Negara; Konstitusi Negara; Kekuasaan dan Politik; Pancasila; dan Globalisasi. Untuk menunjukkan mana-mana kajian yang masuk dalam ranah pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge), dapat di identifikasi dari rumusan kompetensi dasar dari ruang lingkup tersebut. Setiap kompetensi dasar memuat kata “kerja operasional” yang dapat dikenalinya sebagai bagian dari apakah termasuk dalam ranah kognitif, afektif, ataukah psikomotor.

Penting bagi guru PKn untuk memahami bagaimana menentukan dan mendesain model pembealajaran yang mampu mengembangkan pengetahuan dan wawasan kewarganegaraan (civic knowledge). Dengan kata lain bagaimana merancang pendekatan, strategi, metode, maupun teknik yang dapat mengembangkan ranah kognitif siswa.

Model pembelajaran PKn harus disesuaikan dengan tujuan mata pelajaran PKn, yaitu siswa mampu berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif; berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secaara cerdas; berkembang secara positif dan demokratis dan mampu berinteraksi dalam hubungan antar warga.

1. **Civic Skills**

Kompetensi esensial kedua dari civic education (Pendidikan Kewarganegaraan) dalam masyarakat demokratis adalah keterampilan atau kecakapan-kecakapan kewarganegaraan (civic skills). Branson (1998:17) dalam Winarno (2012:145) menyatakan sebagai berikut.

Jika warga negara mempratikkan hak-haknya dan menunaikan kewajiban-kewajibannya sebagai anggota masyarakat yang berdaulat, mereka tidak hanya perlu menguasai pengetahuan dasar sebagaimana diwujudkan dalam lima pertanyaan sebagaimana diuraikan di muka, namun mereka perlu memiliki kecakapan-kecakapan intelektual dan parsipatoris yang relevan. Kecakapan-kecakapan intelektual kewarganegaraan sekalipun dapat dibedakan namun satu sama lain tidak dapat dipisahkan dari kontennya. Kecakapan berpikir kritis tentang isu politik tertentu.

Kecakapan-kecakapan intelektual yang penting untuk seorang warga negara yang berpengetahuan, efektif, dan bertanggung jawab, disebut sebagai kemampuan berpikir kritis. Kecakapan intelektual itu meliputi kemampuan mengidentifikasi, menggambarkan, menjelaskan, menganalisis, menilai, mengambil, dan mempertahankan posisi atas suatu isu Branson (1998) dalam Winarno (2012:146).

Tabel kecakapan-kecakapan kewarganegaraan (civic skills)

|  |  |
| --- | --- |
| Kecakapan intelektual *(intellectual skills)* | Mengidentifikasi *(identifying)*  Menggambarkan *(describing)*  Menganalisis *(analyzing)*  Menilai *(evaluating)*  Mengambil dan mempertahankan posisi atas suatu isu *(taking and defending positions on public issue)* |
| Kecakapan partisipatoris *(participatory skills)* | Berinteraksi *(interacting)*  Memantau *(monitoring)*  Memengaruhi *(influencing)* |

Keterampilan kewarganegaraan disebutkan meliputi keterampilan berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berperan serta aktif mewujudkan masyarakat madani (civil society), keterampilan memengaruhi dan memonitoring jalannya pemerintahan dan proses pengambilan keputusan politik, keterampilan memecahkan masalah sosial, keterampilan mengadakan koalisi, kerjasama, dan mengelola konflik.

Isi dari civic skills ada dua, yaitu intellectual skills (kecakapan intelektual) dan participatory skills (kecaakapan partisipatoris). The National Standards of Civic and Government dan The Civic Framework for 1998 National Assessment of Educational Progress (NAEP) (dalam Winarno 2012:150) membuat kategori mengenai kecakapan-kecakapan ini. Kecakapan-kecakapn intelektual penting untuk seorang warga negara yang berpengetahuan, efektif, dan bertanggung jawab disebut sebagai kemampuan berpikir kritis.

Keterampilan kewarganegaraan disebutkan meliputi keterampilan berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berperan serta aktif mewujudkan masyarakat madani (civil society), keterampilan memengaruhi dan memonitoring jalannya pemerintahan dan proses pengambilan keputusan politik, keterampilan memecahkan masalah sosial, keterampilan mengadakan koalisi, kerjasama, dan mengelola konflik. Yang dimaksudkan civic skills dalam buku terbitan Diknas tersebut adalah participatory civic skills. Sedangkan untuk keterampilan intelektual kewarganegaraan adalah keterampilan intelektual yang rujukan materinya bersumber pada mata pelajaran Kewarganegaraan. Diknas (2004) dalam Winarno (2012:161)

Udin S. Winataputra dalam Winarno (2012:161-163) melalui hasil penelitiannya mengidentifikasi adanya butir-butir dari komponen keterampilan/kecakapan kewarganegaraan. Butir-butir kecakapan kewarganegaraan yang disajikan ini dapat dipakai sebagai rujukan bagi materi mata pelajaran PKn baik di tingkat sekolah maupun perguruan tinggi di Indonesia. Butir-butir tersebut sebagai berikut.

1. Kemampuan berkomunikasi secara argumentatif dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar atas dasar tanggung jawab sosial.
2. Kemampuan berorganisasi dalam lingkungan sekolah atau masyarakat secara cerdas dan penuh tanggung jawab personal dan sosial.
3. Kemampuan berpartisipasi dalam lingkungan sekolah ataupun masyarakat secara cerdas dan penuh tanggung jawab personal dan sosial.
4. Kemampuan mengambil keputusan individual dana atau kelompok secara cerdas dan bertanggung jawab.
5. Kemampuan melaksanakan keputusan individual dan atau kelompok sesuai dengan konteksnya secara bertanggung jawab.
6. Kemampuan berkomunikasi secara cerdas dan etis sesuai dengan konteksnya.
7. Kemampuan memengaruhi kebijakan umum sesuai dengan norma yang berlaku dan konteks sosial-budaya lingkungan.
8. Kemampuan membangun kerja sama dengan dasar toleransi, saling pengertian, dan kepentingan bersama.
9. Kemampuan berlomba-lomba untuk berprestasi lebih baik dan lebih bermanfaat.
10. Kemampuan turut serta aktif membahas masalah sosial secara cerdas dan bertanggung jawab.
11. Kemampuan menentang berbagai bentuk pelecehan terhadap keterampilan warga negara *(civic skills)* dengan cara yang dapat diterima secara sosial-budaya.
12. Kemampuan turut serta mengatasi konflik sosial dengan cara yang baik dan dapat diterima.
13. Kemampuan memimpin menganalisis masalah sosial secara kritis dengan menggunakan aneka sumber yang ada.
14. Kemampuan memimpin kegiatan kemasyarakatan secara bertanggung jawab.
15. Kemampuan memberikan dukungan yang sehat dan penuh tanggung jawab kepada calon pemimpin dalam lingkungannya.
16. Siswa memiliki kemampuan memberikan dukungan yang sehat dan tulus terhadap pemimpin yang terpilih secara demokratis.
17. Kemampuan menunaikan berbagai kewajiban sosial sebagai anggota masyarakat dengan penuh kesadaran.
18. Kemampuan membangun saling pengertian antar suku, agama, ras, dan golongan guna memelihara keutuhan dan semangat kekeluargaan.
19. Kemampuan berusaha membangun saling pengertian antar bangsa melalui berbagai media komunikasi yang tersedia.
20. Kemampuan berusaha untuk meningkatkan kemampuan pribadi dan kegiatan sosial budaya dengan kesadaran untuk berbuat lebih baik.

Dari kedua pendapat tersebut, kita bisa membuat perbedaan civic skills dalam pengertian luas dan sempit. Secara luas, civic skills mencakup intellectual civic skills dan participatory civic skills. Sedangkan secara sempit yang dimaksud civic skills adalah participatory civic skills atau keterampilan kewarganegaraan, seperti dicontohkan Buku Pedoman Khusus Pengembangan Silabus dan Penilaian Mata Pelajaran Kewarganegaraan yang dikeluarkan oleh Diknas (2004).

Kecenderungan pembelajaran PKn yang hanya berorientasi pada pemahaman akan civic knowledge perlu diubah, apalagi sebatas mengajarkan konsep-konsep keilmuan PKn yang sifatnya hafalan. Oleh karena itu, orientasi pada civic knowledge harus dilanjutkan pada pengembangan sub ranah intellectual civic skills yang pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dengan civic knowledge.

Ranah keterampilan kewarganegaraan bila disandingkan dengan pengelompokan Benjamin S. Bloom dalam Winarno (2012:167) tentang taksonomi pembelajaran, maka ia sejajar dengan aspek psikomotorik. Meskipun sejajar, namun tetap perlu dibedakan. Dalam taksonomi Bloom, yang dimaksud ranah psikomotor adalah hasil belajar yang pencapaiannya melalui keterampilan manipulasi yang melibatkan otot dan kekuatan fisik. Padahal keterampilan kewarganegaraan yang dimaksud bukanlah keterampilan dengan kekuatan fisik, tetapi lebih pada keterampilannya berpartisipasi pada kehidupan publik sebagai bentuk dari tanggung jawab kewarganegaraannya.

1. **Civic Disposition**

Komponen mendasar ketiga dari civic education adalah watak kewarganegaraan (civic dispotision) yang mengisyaratkan pada karakter publik maupun privat yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional. Watak kewarganegaraan sebagaimana kecakapan kewarganegaraan, berkembang secara perlahan sebagai akibat dari pada yang dipelajari dan dialami oleh seseorang di rumah, sekolah, komunitas, dan organisasi-organisasi civil society. Watak kewarganegaraan (civic disposition) menunjuk pada karakter publik maupun privat yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional. Secara singkat karakter publik dan privat itu dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Tabel Ciri-ciri Watak Kewarganegaraan (civic disposition)

|  |
| --- |
| 1. Menjadi anggota masyarakat yang independen. |
| 1. Memenuhi tanggung jawab personal kewarganegaraan di bidang ekonomi dan politik. |
| 1. Menghormati harkat dan martabat kemanusiaan tiap individu. |
| 1. Berpartisipasi dalam urusan-urusan kewarganegaraan secara efektif dan bijaksana. |
| 1. Mengembangkan berfungsinya demokrasi konstitusional secara sehat. |

Pentingnya watak kewarganegaraan ini jarang sekali di tegaskan. Karakter publik dan privat yang mendasari demokrasi, dalam jangka panjang, mungkin lebih merupakan dampak dari pengetahuan atau kecakapan yang dikuasai warga negara. Hakim Learned Hand dalam pidatonya di New York (1994) dalam Margaret S. Branson, dkk (1999:26) mengungkapkan pentingnya watak kewarganegaraan ini dalam kata-katanya yang sekarang jadi populer:

“kebebasan terletak pada hati manusia, baik pria maupun wanita. Bila ia sirna maka tak ada konstitusi, hukum, dan pengadilan yang dapat menyelamatkannya. Bahkan konstitusi, hukum, dan pengadilan tak dapat berbuat apa-apa. Namun bila ia masih di sana, maka tak diperlukan lagi konstitusi, hukum, dan pengadilan untuk menjaganya.”

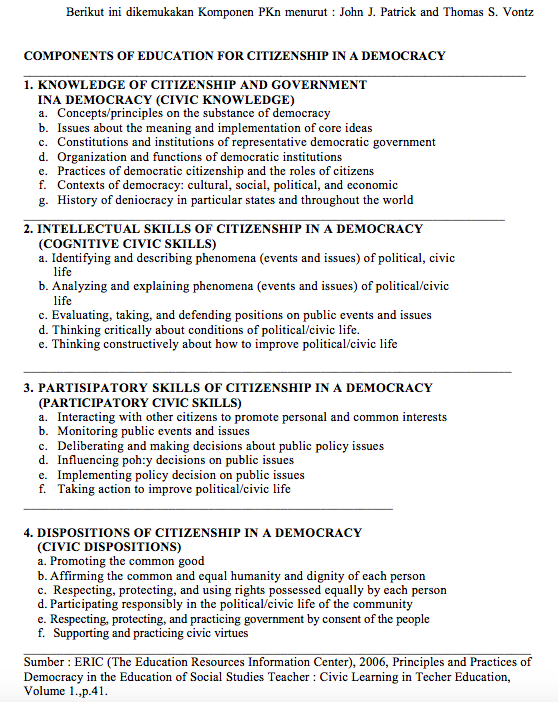
Beradasarkan Permendiknas No. 23 Tahun 2006 dalam Winarno (2014:191) tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL), kita bisa mengidentifikasi sejumlah kompetensi kewarganegaraan dalam dimensi civic disposition, untuk SMP. Dalam dimensi karakter kewarganegaraan, peserta didik diharapkan untuk:

1. Menghargai makna nilai-nilai kejuangan bangsa.
2. Menghargai keputusan bersama.
3. Menunjukkan sikap positif terhadap norma-norma kebiasaan, adat istiadat, dan peraturan, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
4. Menghargai perbedaan dan kemerdekaan dalam mengemukakan pendapat dengan bertanggung jawab.
5. Menunjukkan sikap positif terrhadap pelaksanaan kehidupan demokrasi dan kedaulatan rakyat.
6. Menunjukkan sikap kritis dan apresiatif terhadap dampak globalisasi.

Sebagai pendidikan nilai atau karakter maka salah satu pendekatan pembelajaran dalam PKn adalah pendekatan berbasis nilai (value based approach). Sikap salah satu ranah amat menentukan keberhasilan seseorang dalam belajar. Popham dalam Winarno (2012:194) ranah afektif menentukan keberhasilan belajar seseorang. Pengembangan civic dispotision dapat dilakukan melalui keikutsertaan siswa dalam project citizen, para siswa memiliki satu kesempatan untuk mengembangkan berbagai watak kewarganegaraan dari kewarganegaraan demokrasi seperti nilai politik, kepentingan politik, toleransi politik, komitmen terhadap pelaksanaan hak kewarganegaraan demokrasi, komitmen terhadap tanggung jawab kewarganegaraan demokrasi, komitmen terhadap konstitusionalisme dan kecenderungan untuk berpartisipasi secara politik (Budimansyah 2009:21).

1. **Penutup**

Pengetahuan kewarganegaraan (Civic Knowledge), Ketrampilan kewarganegaraan (civic skills/CS) dan karakter kewarganegaraan (civic dispositions/CD) merupakan faktor determinan dalam upaya mewujudkan warga negara yang baik. Dilihat dari perspektif integrasi politik CS dan CD merupakan aspek penting dalam mengembangkan perilaku integratif yang berkontribusi secara positif terhadap integrasi bangsa (nation building) dan integrasi elite dengan rakyat. Keberhasilan mengembangkan perilaku integratif dalam diri warga negara dapat mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang produktif untuk mewujudkan kebaikan bersama sebagaimana yang dikehendaki dalam cita-cita nasional dan tujuan bernegara.



Dari penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa komponen kewarganegaraan menjadi aspek penting dalam pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Margaret S. Branson (1999:4) mengidentifikasi tiga komponen penting dalam Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu Civic Knowledge (pengetahuan kewarganegaraan), Civic Skills (keterampilan kewarganegaraan), dan Civic Disposition (watak-watak kewarganegaraan). Komponen pertama, civic knowledge “berkaitan dengan kandungan atau nilai apa yang seharusnya diketahui oleh warganegara” (Bransons 1999:8). Aspek ini menyangkut kemampuan akademik-keilmuan yang dikembangkan dari berbagai teori atau konsep politik, hukum dan moral. Dengan demikian, mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bidang kajian multidisipliner. Secara lebih terperinci, materi pengetahuan kewarganegaraan meliputi pengetahuan tentang hak dan tanggung jawab warga negara, hak asasi manusia, prinsip-prinsip dan proses demokrasi, lembaga pemerintah dan non-pemerintah, identitas nasional, pemerintahan berdasar hukum (rule of law) dan peradilan yang bebas dan tidak memihak, konstitusi, serta nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat. Kedua, Civic Skills meliputi keterampilan intelektual (intelectual skills) dan keterampilan berpartisipasi (participatory skills) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketiga, Civic Disposition (Watak-watak kewarganegaraan), komponen ini sesungguhnya merupakan dimensi yang paling substantif dan esensial dalam mata pelajaran PKn. Dimensi watak kewarganegaraan dapat dipandang sebagai "muara" dari pengembangan kedua dimensi sebelumnya.